

KELOMPOK USAHA BERSAMA SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DITINJAU DENGAN FILSAFAT KRITISISME IMMANUEL KANT

¹⁾Nursari Sugiastuti, ²⁾Ahmad Fauzi
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
sarisugiastuti@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan merupakan isu permasalahan negara berkembang termasuk Indonesia. Jumlah penduduk miskin pasca pandemi covid 19 mengalami peningkatan, demikian juga di Kabupaten Temanggung. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Kabupaten Temanggung melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui KUBE dari KPM PKH. Diharapkan dengan program KUBE ini mereka dapat mengembangkan potensinya dan dapat mandiri sehingga bisa meningkatkan kesejahteraannya, yang pada akhirnya dapat keluar dari kemiskinan. Metode penelitian yang dilakukan untuk meneliti KUBE adalah kualitatif, teknik pencarian data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan jenis data primer dan sekunder, adapun proses analisis data adalah dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tulisan ini mencoba meninjau Program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE dengan Filsafat Kritisisme Immanuel Kant yang mensintesis antara Filsafat Rasionalisme yang mengutamakan pengetahuan (a priori) yaitu teori-teori dari para ahli tentang Kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan KUBE dengan Filsafat Empirisme yang mengutamakan pengalaman (a posteriori) yaitu pengalaman-pengalaman para pelaku KUBE di lapangan baik dari anggota, pengurus, pendamping sosial, dan lainnya. Berdasarkan penggabungan atau sintesa kedua hal ini akan muncul hal-hal baru yang bisa menjadi saran masukan dalam pemberdayaan masyarakat sehingga dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan program KUBE.

Kata kunci: Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, KUBE, Filsafat Kritisisme.

Abstract

Poverty is an issue in developing countries including Indonesia. The number of poor people after the covid-19 pandemic has increased, as well as in Temanggung Regency, Central Java Province. In an effort to reduce poverty, Temanggung regency conduct community empowerment activities through KUBE from KPM PKH. It is hoped that with this KUBE program they will be able to develop their potential and become independent so that they can improve their welfare, which in the end can get out of poverty. The research method used to examine KUBE is qualitative, data search techniques are by interviewes, observation, and documentation, with primary and secondary data types, while the data analysis process is by data reduction, data presentation and drawing conclusions. This paper tries to review the community empowerment program through KUBE with Immanuel Kant's Critical Philosophy which synthesizes between rationalism philosophy which prioritizes knowledge (a priori), namely theories from experts on Poverty, Community empowerment and KUBE with empirical philosophy which prioritises experience (a posteriori). Namely the experiences of KUBE actors in the field from members, admintrators, social assistants, and others. Based on the merging or synthesis of these two things, new things will emerge which can become input suggestions in community empowerment so that the KUBE program can be optimezed further.

Keywords: Poverty, Community Empowerment, KUBE, Critical Philosophy.

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals adalah keberlanjutan dari Millenium Development Goals. Keduanya

merupakan dokumen hasil kesepakatan dunia, dan sama-sama mengusung **no poverty (tanpa kemiskinan)** pada salah satu goals nya. Indonesia selaku Negara

anggota PBB juga turut serta dalam deklarasi ini, dan menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Isu kemiskinan masih menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, demikian pula dengan Indonesia. Bagi Indonesia sendiri, kemiskinan masih merupakan persoalan yang menjadi beban berat, terutama dikaitkan dengan isu kesenjangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin.

Angka kemiskinan Nasional tahun 2021 adalah 9,78%, Provinsi Jawa Tengah mempunyai angka yang lebih besar yaitu 11,79% sedangkan Kabupaten Temanggung 10,17%. Angka ini naik dibanding tahun 2020 yang hanya 9,96%, yang artinya penduduk miskin di Kabupaten Temanggung semakin mengalami pertambahan, disebabkan efek pandemi covid 19.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami kenaikan selama rentang waktu tahun 2018-2020, sebagaimana terlihat pada tabel :

Tabel 1
Perkembangan Jumlah
dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Temanggung 2016-2021

Tahun	Jumlah	Prosentase
2016	87.090	11,6
2017	86.770	11,46
2018	75.390	9,87
2019	72.570	9,42
2020	77.330	9,96
2021	79.100	10,17

Sumber: LP2KD Kabupaten Temanggung 2021

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa penduduk miskin di Kabupaten Temanggung selama 2 tahun yaitu dari tahun 2019 sampai 2021 jumlahnya meningkat 6.530 orang. Hal ini salah

satunya adalah dampak dari Pandemi covid 19.

Banyak Program/kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, salah satunya melalui Bantuan Sosial (Bansos). Akhir-akhir ini banyak sekali Program Bansos yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maupun Pemerintah Desa. Misalnya Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM), Bantuan Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJS), Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS), Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT), Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD), dan lainnya.

Program ini merupakan program jangka pendek, maksudnya bantuan yang diberikan akan habis dalam waktu singkat karena sifatnya konsumtif, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan dan kebutuhan konsumtif lainnya. Hal ini tidak akan mengubah masyarakat yang menerima bantuan menjadi lebih “berdaya” dan mampu mengembangkan potensi dirinya. Kondisi mereka akan relatif sama, bahkan ada kecenderungan merasa aman karena ada di zona nyaman sebagai penerima bantuan rutin per bulannya. Sehingga apabila tidak menerima bantuan di suatu waktu akan menimbulkan gelombang pengaduan yang banyak di Dinas Sosial.

Agar mereka dapat meningkatkan potensinya, bisa berkembang menjadi lebih sejahtera maka harus bisa berdiri sendiri atau mandiri mengembangkan potensinya. Diperlukan program selain Bansos atau BLT, yaitu program yang bisa membuat mereka mejadi berdaya karena mampu mengembangkan potensinya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya. Diharapkan pada jangka panjang mereka

akan dapat hidup sejahtera dan terlepas dari kemiskinannya.

Program pemberdayaan masyarakat dirasa tepat untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi, dengan pemberdayaan maka akan bisa berdiri sendiri mampu megembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga sehingga tidak menggantungkan pada bantuan.

Salah satu upaya pemberdayaan yaitu melalui kelompok Usaha Bersama (KUBE), dengan adanya kelompok maka akan saling dukung dan bekerjasama guna mencapai tujuan, yaitu tujuan untuk mandiri dan meningkatkan kesejahteraannya.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari tulisan ini adalah untuk mendapatkan analisis tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk Percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan di kabupaten Temanggung di tinjau dari filsafat kritisisme.

Tujuan dari tulisan ini adalah:

- a. Membuat analisis dengan tinjauan secara rasio tentang pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE.
- b. Membuat analisis dengan tinjauan secara empiris tentang pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE
- c. Memadukan tinjauan secara rasio dan empiris tentang pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE.

Rumusan Masalah

Rumusan masalahnya adalah: Bagaimana tentang Kelompok Usaha Bersama sebagai upaya pemberdayaan masyarakat apabila ditinjau dengan Filsafat Kritisisme Immanuel Kant ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif, yang mendeskripsikan dan menganalisa KUBE sebagai wadah masyarakat miskin dalam upaya

pemberdayaan bagi diri dan kelompoknya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan analisa mendalam tentang KUBE tersebut apabila ditinjau dengan Filsafat kritisisme Immanuel Kant..

Teknik pengumpulan data dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Wawancara yang dilakukan dengan para pelaku KUBE di lapangan, yaitu Perangkat Daerah Dinas Sosial, anggota KUBE, pengurus KUBE, Sekretariat PKH tingkat Kabupaten, pendamping sosial (PPKH dan TKSK), tokoh masyarakat, perangkat desa/kelurahan.
2. Pengamatan atau observasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi KUBE. Lokasi pengamatan adalah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Desa wilayah KUBE berada, dan di lokasi usaha KUBE.
3. Dokumentasi berupa pencarian data terkait penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan KUBE. Data ini diantaranya diperoleh dari BPS, Dinas Sosial, Bappeda, dan Sekretariat PKH Kabupaten Temanggung.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data dari hasil observasi dan wawancara, serta data yang diperoleh dari data hasil olahan BPS, Bappeda, sekretariat PKH, dan dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Proses analisis data yang dilakukan penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu :

1. Reduksi Data (Data Reduction) Data yang diperoleh dilapangan mengenai KUBE sebagai kelompok usaha dari KPM PKH dengan wawancara, observasi dan dokumentasi akan dipilih dan difokuskan pada hal- hal yang berkaitan dengan pemberdayaan

- masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan.
2. **Peyajian Data (Display Data)** Setelah data direduksi kemudian tahap selanjutnya adalah display data atau penyajian data yaitu data KUBE sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung.
 3. **Penarikan kesimpulan (Concluding Drawing Verification)**, dari data KUBE sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan yang disajikan, dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya disebabkan satu hal saja. Mengutip Edi Suharto dalam Buku *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan (2014:131-132). Faktor penyebab kemiskinan antara lain:

- a. SDM rendah
- b. Motivasi rendah
- c. Pandangan dalam hubungan kekeluargaan
- d. Lapangan kerja terbatas
- e. Tidak kreatif

Sebagaimana telah diulas di depan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan pasca pandemi covid 19. Penduduk miskin berada pada tingkat kesejahteraan rendah, mereka mendapat program jaminan sosial, misalnya mendapatkan PKH dan BPNT. Jumlah penerima KUBE Perlu diupayakan agar mereka bisa meningkatkan potensi dirinya sehingga bisa berkembang dan menjadi lebih sejahtera, sehingga tidak memerlukan jaminan sosial secara berkelanjutan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan menentukan masa depan mereka (Saparjan, Suyanto 2003:43) Sedangkan Eddy Papilaya yang dikutip Zubaedi (2007:42) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan merupakan kegiatan yang berproses karena dalam pelaksanaannya harus bertahap hingga mencapai kemandirian. Ambar Teguh Sylistyani (2004:79) mengatakan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian.

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah kondisi suatu masyarakat menjadi berdaya, melalui pengembangan potensi yang dimilikinya sehingga mereka bisa menjadi mandiri.

3. **Kelompok Usaha Bersama** yang selanjutnya disebut KUBE adalah “kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga” (Permensos No. 2 Tahun 2019). KUBE dalam tulisan ini dibatasi pada KUBE KPM PKH. KUBE ini dibentuk dengan membuat kelompok dari mereka yang punya latar belakang sama, yaitu sesama anggota

KPM PKH. KUBE selaku lembaga mikro yang bergerak di bidang ekonomi berupaya untuk mengembangkan potensi-potensi anggotanya, misalnya bertani, dagang, membuat makanan ringan, beternak, dan lainnya.

Pada tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung memberikan Bimbingan Teknis pada KUBE sejumlah 257 dengan rincian, 240 dari APBD II, 12 dari Queensland, dan 5 dari APBD I. KUBE ini mendapatkan bantuan stimulant untuk mengembangkan usahanya. Bantuan stimulant tersebut berkisar antara Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,-. Diharapkan dengan bantuan stimulant tersebut usaha mereka dapat lebih berkembang dan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Guna kelancaran kegiatan Kelompok PKH termasuk didalamnya KUBE, akan didampingi oleh para pendamping sosial yaitu dari unsur Pendamping Program Keluarga Harapan (PPKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK). Jumlah PPKH di Kabupaten Temanggung adalah 101 orang, dan jumlah TKSK adalah 20 orang.

4. Hubungan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kelompok Usaha Bersama

Kemiskinan antara lain disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM, motivasi berusaha rendah, lapangan kerja terbatas dan kurangnya kreatifitas.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah di laksanakan dan di pasca pandemi covid 19 sampai sekarang banyak sekali digelontorkan Bansos / BLT dengan tujuan meringankan beban masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah. Perlu adanya upaya lain selain pemberian Bantuan Sosial atau Bantuan

Langsung Tunai, karena sifatnya hanya konsumtif, berjangka pendek dan cenderung membuat mental masyarakat menjadi terbiasa menunggu pembagian Bansos/BLT.

Perlu adanya upaya pemberdayaan masyarakat karena dengan pemberdayaan masyarakat maka seseorang diupayakan untuk dapat menggali potensi dirinya kemudian mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pemberdayaan ini akan lebih efektif ketika dilaksanakan secara bersama dalam kelompok, sehingga ada perasaan senasib sepenanggungan, saling menguatkan, saling transfer pengetahuan dan lainnya yang pada akhirnya akan menimbulkan solidaritas. Kebersamaan ini dapat menjadi salah satu modal dalam menjalankan usaha bersama.

KUBE merupakan kelompok yang menjadi sarana pemberdayaan masyarakat miskin. Anggotanya memiliki potensi yang sama, dan melalui kelompok tersebut mereka mengembangkan potensi yang mereka miliki secara bersama-sama dalam suatu jenis usaha ekonomi produktif.

Kabupaten Temanggung melaksanakan Program kegiatan Pemberdayaan dengan KUBE pada KPM PKH. KPM PKH ini adalah masyarakat miskin yang mempunyai tingkat kesejahteraan rendah. Diharapkan dengan adanya pemberdayaan melalui KUBE mereka akan dapat meningkatkan potensinya dan pada akhirnya dapat mandiri dan meningkat kesejahteraannya sehingga bisa “graduasi”.

Tujuan jangka panjang pemberdayaan pada KPM PKH melalui KUBE ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, mereka diharapkan bisa keluar dari kemiskinan.

5. Analisis KUBE sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk

Percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan perspektif Filsafat Kritisisme Immanuel Kant.

Aliran Filsafat pada periode filsafat modern diantaranya adalah Filsafat Rasionalisme dan empirisme, dimana keduanya memiliki epistemologi pemahaman yang bertolak belakang. Rasionalisme mengakui bahwa pengetahuan diperoleh dari a priori yang ada pada rasio, dengan kata lain rasionalisme membenarkan pengetahuan yang berasal dari akal pikiran. Sedangkan Empirisme mengakui pengetahuan diperoleh dari a posteriori atau pengalaman. Kemudian muncul Filsafat Kritisisme yang dicetuskan oleh Immanuel Kant yang mensintesakan antara unsur a priori dan a posteriori tersebut. Menurut Kant keduanya sama-sama mempunyai unsur kebenaran, karena saling melengkapi satu sama lain.

Filsafat Kritisisme Immanuel Kant mengandung beberapa spesifikasi yakni objek yang diketahui, subjek yang mengetahui, dan proses bagaimana subjek berhubungan dengan subjek. Apabila KUBE sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk membantu Percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan di tinjau dari filsafat Immanuel Kant, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Objek pengenalan adalah Subjek bukan Objek.
Subjek disini adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bukan Penanggulangan Kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan adalah hal yang ingin dicapai setelah dilakukannya pemberdayaan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah melalui KUBE. Pada tulisan ini masyarakat dengan kesejahteraan terendah yang mengelompok membentuk KUBE adalah KPM

PKH. Pemberdayaan masyarakat bersifat luas, dan KUBE merupakan salah satu bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat tersebut. UBE merupakan wadah bagi KPM PKH yang mengikat mereka dalam kesatuan kelompok usaha. Masing-masing KUBE di Kabupaten Temanggung terdiri dari 10 sampai dengan 20 orang anggota, mereka mempunyai kepengurusan seperti ketua, sekretaris, dan bendahara. KUBE melakukan usaha ekonomi produktif sesuai potensi anggota kelompoknya, mereka menentukan jenis usaha berdasar musyawarah diantara mereka. Pemerintah berupaya memberikan pendampingan pada KUBE melalui para pendamping sosial, yaitu PPKH dan TKSK untuk tingkat desa dan kecamatan, Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial di tingkat Kabupaten.

2. Keterbatasan kemampuan rasio untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu.

Teori pemberdayaan masyarakat memang konsepnya bagus dan masuk akal, secara rasio atau a priori KUBE sebagai upaya pemberdayaan masyarakat apabila di laksanakan maka hasilnya akan baik, dalam arti para anggota akan dapat meningkatkan kesejahteraannya, dan dalam jangka panjang diharapkan dapat keluar dari kemiskinan. Akan tetapi dalam mengimplementasikan KUBE tidak hanya berpedoman pada teori yang ada saja, akan tetapi juga perlu berkaca pada pengalaman yang ada, karena KUBE yang merupakan program turunan dari Departemen Sosial ini sudah ada sejak sekitar tahun 2003 tidak semuanya berjalan dengan lancar dan bisa berkembang sebagaimana

apa yang ada dalam teori. Ada berbagai macam kendala dan permasalahan yang perlu dijadikan pembelajaran dan menjadi bahan masukan dalam melaksanakan program KUBE agar bisa mengantisipasi apabila mengalami permasalahan yang sama. Permasalahan tersebut diantaranya adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan anggota, menyebabkan kegiatan di KUBE kurang berjalan dengan lancar. Perlu adanya upaya memberikan penguatan pada SDM yang menjadi anggota KUBE dengan pengetahuan dan ketrampilan, utamanya yang mendukung jenis usaha KUBE mereka.
- b. Kurangnya kerjasama diantara anggota kelompok karena faktor ego dari masing-masing individu. Perlu adanya penguatan dengan dinamika kelompok dan memberikan pengetahuan tentang pentingnya soliditas dan kerjasama yang baik dalam kelompok.
- c. Kurang transparansi dalam pengelolaan usaha KUBE, khususnya masalah keuangan. Perlu adanya pemberian pengetahuan tentang manajemen dan pengelolaan keuangan KUBE serta pentingnya transparansi.
- d. Kurangnya pendampingan baik pada anggota KUBE maupun pada kelompok /KUBE itu sendiri. Perlunya pendampingan yang intensif dari para pendamping sosial agar bisa senantiasa dipantau perkembangannya dan bisa diketahui dari awal masalah yang terjadi sehingga bisa dapat segera diselesaikan dengan baik.

- e. Kurangnya permodalan KUBE. Usaha seperti roda yang berputar, tidak selamanya akan untung, maka perlu pemberian saran masukan dari para pendamping sosial tentang cara yang kreatif guna meningkatkan hasil, misalnya diversifikasi jenis usaha KUBE, menghubungkan dengan pemasaran yang lebih luas. Dapat pula dibantu dengan menghubungkan dengan sistem sumber yang bisa membantu, misalnya perbankan yang memberikan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), atau pada Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
- f. Kurang berjalannya kepengurusan KUBE. Hal ini biasanya disebabkan karena rendahnya SDM dan kurangnya pengetahuan kepemimpinan. Diperlukan adanya reorganisasi atau pemilihan pengurusan kembali yang difasilitasi oleh pendamping sosial.
- g. Kurangnya dukungan dari lingkungan masyarakat sekitar. Perlu adanya penyadaran pada masyarakat sekitar agar mendukung kegiatan usaha KUBE dengan cara menjadi konsumen bagi produk yang dibuat oleh KUBE.

Permasalahan-permasalahan ini menjadi faktor penghambat bagi keberlangsungan KUBE, sehingga perlu dijadikan sebagai pengalaman karena merupakan unsur empiris atau aposteriori.

3. Pengenalan manusia atas sesuatu diperoleh dari perpaduan unsur a priori dan aposteriori

“Dengan Filsafat Kritisisme maka pengetahuan kita tegak dengan dasar dua kaki yakni unsur

a priori yang ada di akal-budi dan data-data indrawi yang kita peroleh dari pengalaman (unsur a posteriori). Akal-budi tanpa pengalaman adalah kosong, pengalaman tanpa akal-budi adalah hampa” (Wibowo 2009:11). Apabila dikaitkan dengan kegiatan KUBE, maka perlu untuk memahami tentang apa dan bagaimana KUBE mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Cara memahaminya tentu saja dilakukan secara terpadu baik unsur a priori atau rasio maupun aposteriori atau empiris.

Secara a priori maka pengetahuan tentang KUBE di ketahui dari teori-teori yang ada, misalnya teori-teori tentang pemberdayaan masyarakat, teori empowerment, teori community organization, dan lainnya. Selain teori juga dapat mempelajari regulasi tentang KUBE yang diterbitkan oleh pemerintah, misalnya juga dari regulasi atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah, misalnya Peraturan tentang Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin, Peraturan tentang Usaha Ekonomis Produktif, dan lainnya.

Secara a posteriori maka pengetahuan tentang KUBE berasal dari pengalaman-pengalaman dari para pelaku KUBE, misalnya dari Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Pendamping Sosial, Pengurus KUBE, anggota KUBE, dan lainnya. Pengalaman selama ini menyatakan bahwa tidak semua KUBE bisa berjalan lancar, akan tetapi banyak permasalahan yang menjadi penghambat sehingga KUBE menjadi kurang berkembang atau bahkan mati. Pengalaman adalah guru yang berguna, perlu jadi bahan masukan

untuk pengetahuan KUBE supaya bisa mengantisipasi agar tidak timbul permasalahan yang sama.

Filsafat Kritisisme dari Immanuel Kant ini selaras dengan KUBE karena mensintesakan antara rasio atau a priori dengan empiris atau a posteriori, sehingga ada keseimbangan antara teori tentang pemberdayaan melalui KUBE dengan pengalaman para pelaku KUBE di lapangan. Diharapkan dengan adanya saling melengkapi ini maka akan didapat hasil yang optimal dari KUBE dalam upaya pemberdayaan masyarakat guna percepatan penanggulangan kemiskinan.

KESIMPULAN

Program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE menjadi salah satu alternatif dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan Masyarakat melalui KUBE ini apabila ditinjau dengan Filsafat Kritisisme Immanuel Kant yang mensintesakan antara Rasionalisme dengan empirisme, dapat di simpulkan bahwa:

- a priori diperoleh dari teori-teori yang dikemukakan para ahli tentang kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan KUBE
- a posteriori diperoleh dari pengalaman para pelaku KUBE yaitu tentang realisasi pelaksanaan program tersebut di lapangan dan permasalahan serta hambatan yang dialami baik oleh individu selaku anggota KUBE terkait pelaksanaan kegiatan KUBE maupun oleh kelompok KUBE itu sendiri.

Berdasarkan penggabungan atau sintesa kedua hal ini munculah “pengetahuan baru” tentang pemberdayaan masyarakat melalui KUBE, baik itu berupa tata cara persiapan, pelaksanaan, maupun pendampingannya yang memuat hal

secara teori para ahli, regulasi pemerintah dan hasil pengalaman pelaku KUBE di lapangan.

Berdasarkan hal diatas, maka disarankan agar dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui KUBE agar selain berpegang pada teori dan aturan yang ada, juga perlu mengaplikasikan pengalaman-pengalaman yang positif dan mewaspadaai hal negatif yang pernah terjadi pada masa sebelumnya, sehingga bisa mengoptimalkan KUBE dan meminimalisir kegagalan. Hal tersebut diantaranya adalah:

1. Perlunya pemetaan potensi, jangan memaksakan jenis kegiatan yang tidak sesuai potensi yang dimiliki.
2. Perlunya peningkatan kapasitas anggota sesuai potensi yang dimiliki.
3. Perlunya menanamkan soliditas antar anggota, dan rasa memiliki pada kegiatan yang menjadi pilihan.
4. Perlunya pendampingan yang berkelanjutan, karena program KUBE merupakan jangka panjang, tidak bisa secara instan terwujud hasilnya.
5. Perlunya menghubungkan ke sistem sumber yang dapat membantu pengembangan usaha KUBE.

DAFTAR PUSTAKA

- Suharto, E. 2014. *Membanngun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Kant, Immanuel. 1990. *Critique of Pure Reason*, terj. J.M.D. Meiklejhon. Prometheus Books. New York:
- Ghony, MD & Almansur, F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Muthmainah, L. (2018). *Tinjauan Kritis Terhadap Epistimologi Immanuel Kant (1724-1804)*. Jurnal Filsafat. Volume. 28
- Muslim, A. (2012). *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Rumidi, S. (2012), *Metodologi Penelitian petunjuk praktis untuk peneliti pemula Cet 4*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi: suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung.: Alfabeta, CV.
- .Tampubolon, J. (2006) *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok: Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)* Disertasi. Bogor: Institut Pertanian.
- Wibowo, W. (2009). *Kritisisme Kant: Sintesis Antara Rasionalisme dan Empirisme* Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta: Ar Ruzz Media
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Jakarta.
- Kementerian Sosial RI. 2018. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Jakarta.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi

- Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin. Jakarta.
- Kabupaten Temanggung 2019. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Temanggung.
- Kabupaten Temanggung. 2022. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Temanggung. Temanggung.
- Bappeda Kabupaten Temanggung, (2021). *Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten (LP2KD) Temanggung Tahun 2021*. Temanggung